



Pengaruh kompetensi, independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Jauza Islamia Putri¹, Bainil Yulina², Indriasari³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

jauza21@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

4 September 2022

Disetujui :

15 September 2022

Dipublikasikan :

25 September 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi, Independensi dan Due Professional Care terhadap Kualitas Audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dengan sampel yang berjumlah 90 orang. Penelitian ini menggunakan Disproportionate Stratified Random Sampling dan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan 5 (lima) poin skala likert. Analisis data menggunakan program SPSS versi 25. Metode statistik dalam menguji hipotesis penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kompetensi dan Due Professional Care berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit (2) Kompetensi, Independensi dan Due Professional Care secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Kompetensi, Independensi, Due Professional Care, Kualitas Audit

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Competence, Independence and Due Professional Care on Audit Quality. The population in this study were all auditors at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of South Sumatra Province with a sample of 90 people. Collecting data by distributing questionnaires using a 5 (five) Likert. Data analysis used SPSS version 25. The statistical method in testing the research hypothesis was multiple linear regression analysis. The results of the study show that: (1) Competence and Due Professional Care have an effect on Audit Quality, while Independence has no effect on Audit Quality (2) Competence, Independence and Due Professional Care simultaneously affect Audit Quality at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) South Sumatra Province.

Keywords: Competence, Independence, Due Professional Care, Audit Quality



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia selama enam bulan awal 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 169 kasus. ICW juga menyebutkan nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian sebesar 47,6%. Permasalahan terkait kasus korupsi dalam pembangunan juga terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang terungkap pada tahun 2021. Diantaranya yaitu kasus korupsi proyek Masjid Sriwijaya di Palembang. Kasus ini merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 116,9 miliar. Tak hanya itu, kasus korupsi juga terjadi di wilayah Banyuasin dengan proyek pembangunan rumah sakit, tepatnya di RS Kusta dr.Rivai Abdullah, Banyuasin. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5 miliar, dalam proyek yang dibiayai APBN tahun 2017. Temuan-temuan yang ada menjadi tugas besar bagi pihak pengawasan dan pemeriksa keuangan negara.

Dalam rangka menjaga hasil mutu pengawasan intern ditetapkanlah standar pedoman APIP sebagai audit internal nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia mengenai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagai standar melaksanakan kegiatan audit intern. Dalam hal ini auditor internal termasuk BPKP yang bergerak di bidang pengawasan harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan ketika melaksanakan kegiatan audit intern. SAIPI mensyaratkan APIP memiliki program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini sejalan dengan model peningkatan kapabilitas APIP yang mengharuskan APIP memiliki kerangka kerja peningkatan kualitas pengawasannya. Program pengembangan dan penjaminan kualitas dalam SAIPI mencakup penilaian intern. Penilaian intern mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit intern dan penilaian oleh orang lain dalam APIP dengan pengetahuan yang cukup tentang praktik audit intern. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu lembaga yang membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugasnya. BPKP merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan pribadi.

Kompetensi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit karena kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor. Menurut Pianida (2018) kompetensi adalah kemampuan seseorang berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan atau latihan-latihan baik secara kognitif, efektif, dan performance sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotorik secara cerdas dan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam SAIPI pada SA (Standar Atribut:1210) auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wicaksono (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Layli (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pada SAIPI dalam SA (Standar Atribut:1100) dikatakan bahwa aktivitas pengawasan intern auditor harus dilaksanakan secara independen. Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Menurut Sudaryo dan Yudanegara (2017) independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh instruksi atau pengarahan atau kontrol dari pihak lain. Mulyadi (2014:26) mengatakan bahwa "Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain". Sikap independen juga didasari oleh sikap jujur dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan dengan pertimbangan yang objektif. Independensi diperlukan oleh auditor untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Jika auditor tidak menerapkan independensi maka pendapat yang diberikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Yoanita (2018) dan Biri (2019) dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Auditor juga harus menggunakan kecermatan profesional (*due professional care*) dalam setiap penugasannya. Cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penarikan simpulan yang akan memengaruhi kualitas audit (SAIPI, SA:1220). Pengawasan Intern yang bernilai tambah dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka pelaksanaan pemeriksaan perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional yang memiliki kompetensi, independensi, dan juga *due professional care* untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan sebagai

pertanggung jawaban. Penelitian terdahulu mengenai due professional care dilakukan oleh Putri (2021) bahwa due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor harus berhati-hati untuk mencapai kualitas laporan audit agar tidak menyesatkan keputusan pengguna. Hal ini memberikan suatu gambaran pentingnya menjaga kualitas pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dan mencegah meningkatnya kasus KKN di lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatra Selatan sejumlah 115 orang.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Nama Bagian	Jumlah (Orang)
1	Auditor Muda	43
2	Auditor Pertama	15
3	Auditor Madya	23
4	Auditor Penyelia	9
5	Auditor Pelaksana	9
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	9
7	Auditor Madya Selaku Koordinator Pengawasan	7
Jumlah		115

Dilihat dari jumlah populasi yang ada teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Disproportionate Stratified Random Sampling. Untuk menentukan masing-masing strata penulis menghitung jumlah sampel yang dilakukan dengan menggunakan rumus Yamane dkk sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N= Jumlah populasi

e= Tingkat kesalahan sampel (sampling error), 5%

Dengan populasi (N) sebanyak 115 orang dan tingkat kesalahan sampel (sampling error) sebesar 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{115}{1 + 115 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{115}{1,28}$$

$$n = 89,8 \text{ atau } 90 \text{ orang}$$

Setelah mendapatkan jumlah sampel sebesar 90 orang. Penulis menghitung jumlah sampel pada masing-masing strata. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	Nama Bagian	Populasi	Sampel	Jumlah sampel yang mewakili (Orang)
1	Auditor Muda	43	$\frac{43}{115} \times 90 = 33,6$	34
2	Auditor Pertama	15	$\frac{15}{115} \times 90 = 11,7$	12

No	Nama Bagian	Populasi	Sampel	Jumlah sampel yang mewakili (Orang)
3	Auditor Madya	23	$\frac{23}{115} \times 90 = 18$	18
4	Auditor Penyelia	9	$\frac{9}{115} \times 90 = 7,0$	7
5	Auditor Pelaksana	9	$\frac{9}{115} \times 90 = 7,0$	7
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	9	$\frac{9}{115} \times 90 = 7,0$	7
7	Auditor Madya Selaku Koordinator Pengawasan	7	$\frac{7}{115} \times 90 = 5,4$	5
Jumlah		115		90

Teknik Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program Statistica Program and Service Solution (SPSS) Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengantarkan secara langsung kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu seluruh auditor yang terdapat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Pengisian kuesioner ini dibagikan di BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 90 kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 responden, dari 90 kuesioner yang dibagikan, pengembalian kuesioner yang diterima peneliti sebanyak 62 kuesioner. Perhitungan persentase dari jumlah pengembalian kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan yang dibagikan yaitu sebesar 69% dari total 100% yang didapat oleh peneliti.

Deskriptif Data

Menurut Sugiyono (2017:207) "Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi". Statistik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kompetensi	62	25	35	29.79	2.777
Independensi	62	23	35	29.84	3.393
Due Professional Care	62	17	25	21.44	2.085
Kualitas Audit	62	41	55	47.97	3.967
Valid N (<i>listwise</i>)	62				

Pengujian statistik pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai minimum variabel Kompetensi sebesar 25, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,79 dengan standar deviasi sebesar 2,777. Nilai minimum variabel Independensi sebesar 23, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*)

sebesar 29,84 dengan standar deviasi sebesar 3,616. Nilai minimum variabel *Due Professional Care* sebesar 17, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,44 dengan standar deviasi sebesar 2,085. Nilai minimum variabel Kualitas Audit Instansi Pemerintah sebesar 41, nilai maksimum 55 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 47,97 dengan standar deviasi sebesar 3,967. Nilai rata-rata dan nilai standar semua variabel ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Hipotesis Penelitian Kompetensi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} Kompetensi sebesar 4,617 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,00172. Artinya nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh Kompetensi dengan Kualitas Audit. Nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini pada variabel Kompetensi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini membuktikan bahwa auditor yang kompeten dan berpengalaman dibidangnya akan menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih baik dari auditor yang tidak kompeten dan berpengalaman rendah. Semakin kompeten seorang auditor akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Dengan demikian, kompetensi merupakan keahlian, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai salah satu bagian terpenting dan sebagai keunggulan dalam bidang tersebut. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terbukti memiliki pengalaman praktik yang memadai serta berpengetahuan luas, mempunyai keahlian untuk menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik. Auditor yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas serta mampu menangani ketidakpastian dalam laporan audit. Auditor dapat dengan mampu bekerja sama dalam tim juga menjadi komponen yang sangat penting untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

Independensi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel Independensi sebesar 1,676 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,00172. Artinya nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} sehingga H_2 ditolak, hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel Independensi dengan Kualitas Audit. Nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini pada variabel Independensi sebesar 0,099 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa variabel Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sehingga H_2 ditolak.

Independensi auditor berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada orang lain. Tekanan pada auditor dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor sebagai penelaah dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan pemangku kepentingan, dan mempengaruhi auditor dalam menentukan jenis rekomendasi audit yang akan diambil. Pada hasil tersebut dapat disebabkan oleh penyusunan program audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tidak terbebas dari campur tangan pimpinan (pejabat) untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa, artinya untuk menghasilkan laporan audit, auditor masih mempertimbangkan fakta dengan pertimbangan yang objektif dari pimpinan dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Due Professional Care

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel *Due Professional Care* sebesar 2,748 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,00172. Artinya nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} sehingga H_3 diterima, hal ini dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel *Due Professional Care* dengan Kualitas Audit. Nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini pada variabel Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,008 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa variabel *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional (*due professional care*). Pimpinan APIC harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan

Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan. Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terbukti memiliki kecermatan profesional dan kecakapan setiap penugasannya. Auditor memiliki sikap skeptis atau keraguan terhadap kualitas informasi keuangan klien guna untuk mendeteksi kecurangan atau kekeliruan dalam pelaporan hasil audit. Cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penarikan kesimpulan. Kecermatan profesional yang dimiliki auditor menunjang pengaruh hasil kualitas audit yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah, maka peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini dibuktikan dari nilai t -hitung $4.617 > t$ -tabel $2,00172$. Artinya, semakin tinggi tingkat Kompetensi maka potensi pelaporan hasil Kualitas Audit semakin meningkat. Independensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini dibuktikan dari nilai t -hitung $1.676 < t$ -tabel $2,00172$. Artinya, semakin tinggi nilai Independensi maka akan mengakibatkan semakin rendahnya Kualitas Audit yang dihasilkan. Due Professional Care secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini dibuktikan dari nilai t -hitung $2.748 > t$ -tabel $2,00172$. Artinya, semakin tinggi tingkat Due Professional Care akan semakin tinggi pula Kualitas Audit yang dihasilkan. Kompetensi, Independensi, dan Due Professional Care secara simultan berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Jilid 1*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Angelo, L. D. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting & Economics*.
- Apdarensena, N. R. (2021). Pengaruh Kompetensi, Moral Reasoning, Due Professional Care, Integritas Auditor, Dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Yogyakarta). *dspace.uii.ac.id*.
- Arens A.A, R. J. (2012). *Pendekatan Terpadu (Auditing An Integrated Approach)*, Jilid 1, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, M. L. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit. Vol 8, No 2 (2020).
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (n.d.). Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Retrieved from https://aaipi.or.id/mcont/get_content/27
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). Retrieved from <https://www.bpkp.go.id/>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Retrieved from <https://jdih.bpkp.go.id/search/www/index.php/web/result/1/detail>
- Baswari, A. R. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika Auditor dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit Internal Pada Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten di Yogyakarta. UPN Veteran Yogyakarta.
- Biri, S. F. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Di Kota Yogyakarta). *Akuntansi Dewantara* Vol. 3 No. 2 .

- Fitria Fauzi, A. B. (2019). *Metode Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi (Aplikasi SPSS dan EVIEWS untuk Teknik Analisis Data)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gea, R. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Due Professional Care, dan Self Efficacy Terhadap Kualitas Audit. repository.umsu.ac.id.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Cetakan VII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Izzatul Farida, A. H. (2016). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Due Professional Care, dan Etika terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Kota Malang). Vol. 4 No. 1.
- Jusup, A. H. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.